



METODE BERPIKIR EKONOMI *MAINSTREAM*, ETIKA DAN Keadilan

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada
Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
Semarang

7 Juli 2007

Oleh :
FX Sugiyanto

**METODE BERPIKIR EKONOMI *MAINSTREAM*,
ETIKA DAN Keadilan**

FX SUGIYANTO

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada
Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Semarang, 7 Juli 2007

Cetakan pertama, 2007
Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Semarang

ISBN 979-704-516-1

“Milikilah keberanian
untuk menggunakan akalmu sendiri”
(Emanuel Kant)

Orang tidak menjadi tua
karena bertambahnya usia,
tetapi karena ia menyerah
dan mengucapkan selamat tinggal
kepada cita-citanya.
Kamu akan muda
semuda kepercayaanmu,
dan akan tua setua keraguanmu
(Albert Scheitzer)

***Dalam nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang***

Yang saya hormati:

Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro

Sekretaris Senat Universitas Diponegoro

Para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar Universitas
Diponegoro

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, para Bupati, para Pejabat Sipil
dan Militer, para Pimpinan dan Anggota Legislatif

Para Guru Besar dari luar Universitas Diponegoro

Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro dan Ketua
Lembaga di Universitas Diponegoro

Para Dekan, Pembantu Dekan dan para Ketua Program

Para Undangan dari Perguruan Tinggi di luar Universitas
Diponegoro, Perbankan dan teman-teman Wartawan

Rekan-rekan Staf Pengajar, Staf Administrasi dan para
Mahasiswa dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Selamat pagi, salam sejahtera, semoga berkat Tuhan Yang Maha Kasih selalu menyertai kita. Puji syukur kita hunjukkan kepada Allah Yang Maha Baik, karena atas rahmat dan karunia-NYA kita diperkenankan hadir pada pagi yang berbahagia ini.

Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional yang telah

menyetujui dan mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Universitas Diponegoro terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006. Selanjutnya terimakasih saya sampaikan kepada Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan judul **METODE BERPIKIR EKONOMI MAINSTREAM, ETIKA DAN KEADILAN**, dalam acara Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro pada hari ini.

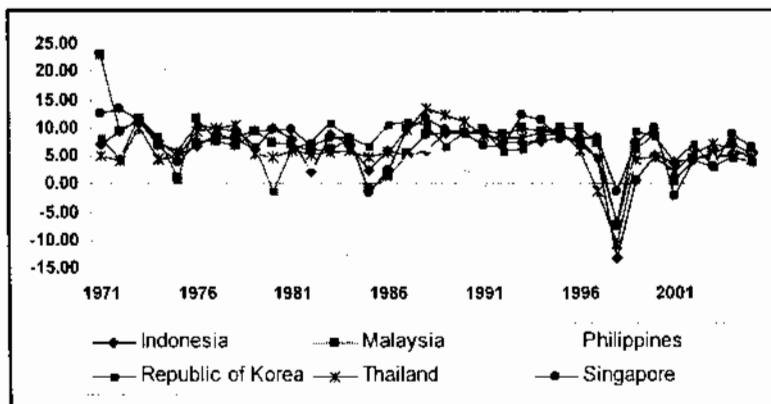
Mengawali refleksi kali ini, perkenankan saya mengajukan pertanyaan yang agak provokatif: "Masih relevan ilmu ekonomi yang kita pelajari ini dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang terjadi dan masih akan terjadi dewasa ini, khususnya di Indonesia?" Sesungguhnya pertanyaan ini muncul bukan dari saya, melainkan dari para mahasiswa saya, ketika kita menghadapi fakta-fakta keterpurukan ekonomi Indonesia akhir tahun 1990-an dan ilmu ekonomi mendapat hujatan karena dianggap tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu pula, dalam buku *The Death of Economics*, Paul Ormerod mengatakan ilmu ekonomi sudah mati (Ormerod, 1997). Ormerod mengatakan bahwa para ekonom tradisional -demikian Ormerod menyebutnya- memandang perekonomian dengan cara yang tidak pernah mereka pahami. Menurutny, ekonomi tidak selalu berjalan secara deterministik, *controllable* dan mekanistik dan karena itu kita memerlukan cara baru untuk melihatnya apabila kita berkeinginan untuk menerapkannya secara sukses.

Hampir senada dengan Ormerod, Fritjof Capra (2000: 253) mengatakan bahwa ilmu ekonomi saat ini ditandai dengan

pendekatan reduksionis dan terpecah-pecah. Menurutnnya, para ahli ekonomi biasanya gagal mengetahui bahwa ilmu ekonomi hanyalah satu aspek dari suatu keseluruhan susunan ekonomi dan sosial, suatu sistem hidup yang terdiri dari manusia dalam interaksi yang terus menerus satu sama lain dan dengan sumber daya alam sekitarnya yang sebagian besar diantaranya berupa organisme hidup. Atau memang benar apa yang ditanyakan John Horgan (2005) kepada Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Khun dan Paul Feyerabend atas posisi filosofis yang skeptis dari ilmu pengetahuan bahwa mereka telah memberikan kekuatan yang berlebihan kepada ilmu pengetahuan sehingga telah membawa ilmu pengetahuan itu sendiri kepada kematiannya?

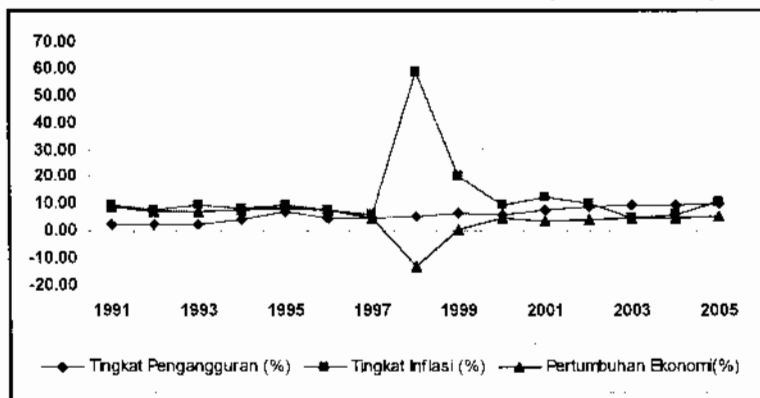
Fakta-fakta ekonomi Indonesia antara tahun-tahun sebelum tahun 1998 dan sesudahnya memberikan ilustrasi betapa ekonomi Indonesia dan beberapa negara lain di kawasan Asia begitu tergoncang. Krisis itu datangnya seolah begitu tiba-tiba. Setelah mengalami pertumbuhan tinggi sekitar 25 tahun, dari tahun 1971-1997, Indonesia (7,21 persen), Malaysia (8,14 persen), Philipina (3,68 persen), Thailand (7,20 persen) dan Korea Selatan (7,82 persen), negara-negara tersebut mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 (Gambar 1). Diantara berbagai negara yang dilanda krisis, kondisi Indonesia tergolong yang paling parah. Hampir semua indikator makro ekonomi memburuk. Pertumbuhan ekonomi menurun dan negatif, tingkat inflasi meningkat tajam, nilai tukar Rupiah menurun dan tingkat pengangguran meningkat tajam (Gambar 2).

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Asia
(1971-2001)



Sumber: <http://millenniumindicators.un.org/unsd/snaama/dhllist.asp>

Gambar 2
Indikator Ekonomi Makro Indonesia (1991-2005)



Sumber : www.adb.org/statistics

Mengapa sendi-sendi ekonomi Indonesia tampak begitu rapuh dan kehancuran tersebut seolah-olah tiba-tiba datangnya, sementara pemulihan ekonomi terasa begitu lambat? Atas dasar kenyataan tersebut, ilmu ekonomi dituduh tidak berdaya dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan riil masyarakat.

Bagi kita, para sarjana ekonomi dan guru besar ekonomi, situasi tersebut memberi peluang kepada kita untuk kembali merenungkan pertanyaan besar berikut; **“Tidakkah ada yang salah dalam ilmu ekonomi yang kita pelajari?”** atau **“Apakah ilmu ekonomi dewasa ini sedang berada pada suatu krisis konseptual yang hebat?”** Pada hemat saya, ilmu ekonomi masih mampu menjawab berbagai persoalan tadi tetapi perlu metodologi yang berbeda atau setidaknya-tidaknya dengan pendekatan dan cara pandang yang berbeda dari yang selama ini kita gunakan. Hingga saat ini pemikiran ekonomi Neoklasik tetap menjadi pemikiran arus utama (*mainstream*) dalam ilmu ekonomi yang diajarkan di kebanyakan perguruan tinggi. Esensi pemikiran ekonomi Neoklasik adalah keyakinan akan bekerjanya mekanisme pasar secara sempurna sehingga tidak diperlukan campur tangan pemerintah (*laissez faire*) dan bahwa kegiatan produksi akan selalu menciptakan permintaan dengan level yang sama sehingga tidak mungkin terjadi kelebihan produksi dan pengangguran permanen. Kerangka dasar analisis pemikiran Neoklasik, dengan tokoh puncaknya Alfred Marshall (1842-1924), adalah *supply side management* yang merupakan pengembangan dan sintesis pemikiran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Jean-Baptiste Say (Mazhab Klasik) dengan William Stanley Jevons, Carl Menger dan Leon Walras

(Mazhab Marginalis).

Ilustrasi berikut ini memberi gambaran akan perlunya pendekatan baru itu. Ketika perekonomian dunia mengalami stagnasi tahun 1930-an, John Maynard Keynes muncul dengan bukunya yang kemudian menjadi dasar analisis ekonomi makro modern; "*The General Theory of Employment, Interest and Money*". Buku itu lahir sebagai jawaban atas kebekuan pemikiran ekonomi pada saat itu ketika pemikiran ekonomi didominasi pemikiran ekonomi Neoklasik dengan penekanan utama pada analisis perilaku ekonomi mikro. Menurut Keynes fakta terjadinya pengangguran yang besar, depresi dan inflasi yang berkepanjangan telah menggugurkan teori Neoklasik (Keynes, 1964). Oleh karena itu, teori ekonomi Keynes justru berangkat dari dasar yang sama sekali berbeda dengan Neoklasik, yakni *aggregate demand management*. Kerisauan Keynes atas kondisi faktual ekonomi masa itu yang kemudian melahirkan teori dengan kerangka pemikiran *aggregate demand management*, akhirnya menjadi tonggak berkembangnya ekonomi makro modern. Keynes dalam hal ini menawarkan sebuah metodologi baru dalam ilmu ekonomi. Situasi yang hampir sama sesungguhnya juga dialami oleh David Ricardo pada pertengahan pertama abad ke-19 ketika Inggris kekurangan gandum dan diblokade oleh tentara Napoleon, bersamaan dengan semakin kuatnya keyakinan bahwa perdagangan antar negara tidak lagi diperlukan, bahkan yang diperlukan justru proteksi. Menghadapi kebekuan seperti itu, sebagai anggota parlemen, Ricardo mampu memecahkan persoalan dengan mengajukan teorinya mengenai keunggulan komparatif

(*comparative advantage*).

Baik Keynes maupun Ricardo memberi keyakinan akan perlunya metodologi baru dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan ketika teori-teori yang ada tidak lagi mampu menyelesaikannya. Di samping itu, kita juga dapat melihat bahwa suatu teori lahir dari dan berpangkal pada sudut pandang dan masalah yang melatarbelakanginya. Artinya, sistem nilai secara intrinsik terkandung di dalamnya. Teori-teori tersebut mendapatkan legitimasinya karena relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dan realistik terhadap kondisi sosial masyarakat. Ilmu ekonomi yang sekarang menjadi arus utama tidak lagi mencukupi untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan riil ekonomi. John Kenneth Galbraith mengkritiknya dengan mengatakan ilmu ekonomi jauh dari realitas karena tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan (Galbraith, 1971 dalam Mubyarto, 1979). Dengan mengatakan

"...it is the available doctrine. Students arrive: something must be taught; (and) the neoclassical model exists" (Galbraith, 1971 dalam Mubyarto, 1979)

Galbraith ingin menunjukkan akan perlunya metodologi ilmu ekonomi yang lebih realistik terhadap perkembangan masyarakat.

Kita akan menjawab berbagai pertanyaan di atas melalui beberapa tahapan uraian. Pada bagian pertama uraian saya, kita akan secara ringkas menelusuri perkembangan pemikiran

ilmu ekonomi hingga Mazhab Neoklasik. Perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya secara umum tidak beranjak dari arus utama tersebut (Landreth, 1994). Pada bagian ini kita akan melihat betapa ilmu ekonomi menjadi steril dan kering dari nuansa etis. Sterilisasi ilmu ekonomi ini pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan yang pelik, yakni masalah keadilan. Pembahasan akan masalah keadilan akan kita uraikan pada bagian kedua makalah ini. Pada bagian kedua pula, kita akan membahas aspek keadilan distributif dan menggali spirit etis masalah keadilan tersebut dengan mengacu kepada pemikiran-pemikiran abad pertengahan. Pilihan untuk mengacu pada pemikiran ekonomi abad pertengahan seiring dengan adanya kehausan untuk menggali dasar-dasar moral dan etika yang saat ini terasa semakin urgen. Pada bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir, kita akan melakukan refleksi atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini kita pilih dan mencoba menemukan kembali “spirit etis”-nya sehingga ilmu ekonomi lebih berperan dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan.

Newton, Adam Smith dan Neoklasik

Sejarah pemikiran ekonomi mencatat bahwa perkembangan ilmu ekonomi “modern” bertonggak mulai abad ke-18 dan berpuncak pada Neoklasik. Sejalan dengan perkembangan ilmu alam dan matematika, ilmu ekonomi tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu alam dan matematika, khususnya metode berpikir **Rene Descartes** dan **Isaac Newton**. Matematika telah menjadi bahasa yang universal dan

ilmu ekonomi-pun telah menempatkan matematika sebagai bahasa utamanya untuk menyederhanakan model-model perilaku. Matematika telah ditransformasi sebagai bahasa dalam ilmu sosial, bahkan menurut Samuelson telah menjadikan para ahli fisika menjadi cemburu (Solo, 1991: 97).

Selama lebih dari satu setengah abad, sejak Stanley Jevons dan Carl Menger (Mazhab Austria), matematika telah menjadi alat wajib dan bahasa utama dalam metodologi ilmu ekonomi. Dan semenjak suksesnya revolusi ilmu pengetahuan *newtonian*, *natural laws* menjadi basis perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi.

Selama ini **Isaac Newton** lebih banyak kita kenal sebagai penemu teori di bidang fisika. Mari kita sedikit mengenal si jenius ini! Pada tahun 1665, ketika Newton berusia 23 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa, Universitas Cambridge tempat Newton belajar ditutup sementara karena wabah penyakit pes. Newton kemudian memutuskan kembali ke kampung halamannya. Selama empat tahun mengasingkan diri, ia melakukan eksperimen-eksperimen yang hasilnya sangat menakjubkan dan menjadi awal revolusi *newtonian*. Sebelum usianya mencapai 25 tahun, ia telah melahirkan tiga penemuan yang akhirnya mengantarkannya sebagai pemikir ilmiah tertinggi segala zaman. Penemuan Newton yang pertama adalah perhitungan diferensial/ kalkulus yang disebutnya "*fluxion*". Perhitungan ini meliputi segala macam yang berkaitan dengan konsep *flow*, gerakan benda-benda, gelombang dan masalah-masalah pokok fisika. Temuan kedua adalah mengenai spektrum cahaya dan temuan ketiga yang sangat terkenal adalah hukum gaya berat universal. Kehebatan Newton dalam hal ini adalah

kemampuannya menjelaskan bahwa gravitasi sebagai hukum universal, sebagai *natural law*, yang pada akhirnya menjadi inspirasi perkembangan ilmu modern. Dalam revolusi ilmu pengetahuan, Newton merupakan “pesintesis agung” karya-karya Copernicus, Galileo, Kepler, Bacon dan Descartes. Fisika Newton merupakan mahkota prestasi ilmu pengetahuan abad ketujuhbelas yang memberikan suatu teori matematis yang konsisten tentang dunia dan menjadi dasar pemikiran ilmiah hingga abad kedua puluh (Capra, 2000: 66).

Bagaimana pemikiran *newtonian* ini memengaruhi ilmu ekonomi? Pengaruh terbesar Newton dalam ilmu ekonomi adalah dalam hal pencerahannya, di samping tentunya pada matematika sebagai bahasa utama untuk menjelaskan abstraksi atau model dalam ilmu ekonomi, terutama sejak Mazhab Neoklasik (1850–1929). Hukum alam Newton yang menjadi dasar teori harmoni (Smith) merupakan buah analogi Smith atas metode yang dikembangkan Newton. Sementara, dukungan Newton terhadap *natural theology* merupakan dasar yang sama dengan filsafat moral Adam Smith. Sistem ekonomi sebagaimana dikemukakan Smith merupakan analogi sistem alam semesta yang diterangkan oleh Newton.

Mari kita lihat perbandingan tersebut. Sistem Newton mencakup tujuh karakter, yaitu:

1. Adanya keteraturan dan struktur alam yang tampak dalam perilaku yang dapat dipahami oleh pikiran manusia
2. Adanya sistem atau subsistem yang dapat diisolasi dalam struktur alam dan bahwa perilaku alam dapat dipahami sebagai bagian dari sistem atau subsistem

yang dapat diisolasi

3. Struktur perilaku alam bergerak dalam suatu sifat universal dan kecenderungan sifat atom atau elemen
4. Hasil tersebut bersifat sistemik, teratur dan harmonis
5. Keteraturan tersebut terjaga melalui suatu keteraturan operasi dalam suatu kecenderungan yang berlawanan
6. Terdapat kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor pengganggu yang bekerja dalam suatu sistem tetapi tidak saling mengacau
7. Sistem tersebut akan selalu melakukan penyesuaian otomatis dan melakukan penyeimbangan secara otomatis (*self adjusting and self equilibrating*).

Menurut Adam Smith, sistem alam semesta Newton mempunyai kesamaan dengan sistem sosial Adam Smith. Oleh karena itu, sistem sosial Adam Smith selalu mengandung tiga elemen dasar, yakni; kepercayaan pada **fisika sosial**, **naturalisme** dan **derivasi dari teori moral alamiah**. Kepercayaan pada fisika sosial akan membentuk suatu kepercayaan bahwa semesta sosial merupakan subyek dari hukum alam (*natural law*). Sebagaimana dalam alam semesta, hukum alam akan bekerja menurut rencana Allah (*God's blueprint*). Naturalisme mempunyai arti dan implikasi bahwa hukum alam menentukan hasil dan juga merupakan sebab sesuatu. Teori moral sosial berpandangan bahwa motivasi dibalik kehendak sosial adalah kebahagiaan (*happiness*).

Konsepsi Smith akan sistem sosial yang diinterpretasi dari sistem alam semesta Newton dapat dilihat dari:

1. Interpretasi Smith mengenai masyarakat sebagai suatu sistem alamiah (*natural system*) secara jelas paralel dengan sistem alam dalam alam semesta Newton. Smith menganalogikan sistem sosial sebagaimana sistem alam semesta Newton dalam ilmu alam. Oleh karena itu, Smith menempatkan sifat-sifat hubungan antar individu sebagaimana sifat hubungan dalam alam semesta. Karena itulah dia menempatkan teori harmoni (*natural law*). Analogi ini mempunyai konsekuensi bahwa sistem sosial Smith seolah juga merupakan sistem yang dapat diisolasi sebagaimana sistem alam semesta yang **bebas nilai**
2. Atom dalam sistem alam semesta dalam sistem sosial Adam Smith adalah individu yang bertindak menurut kehendak yang bersifat umum. Kecenderungan umum ini dapat dibandingkan dengan teori gravitasi Newton yang adalah juga merupakan hukum universal. Kehendak umum yang bersifat harmoni inilah yang oleh Adam Smith diyakini akan menciptakan kesejahteraan suatu bangsa. Di balik kehendak yang bersifat umum itulah bekerja *the invisible hand* dalam sistem sosial Smith
3. Operasi sistem sosial dapat dijelaskan dalam konteks *blind mechanical* (Smith menyebutnya sebagai *invisible hand*) dan interaksi elemen-elemen yang mendasarkan pada kehendak umum tersebut
4. Sebagaimana Newton, dalam sistem sosial Smith, kekuatan kepentingan, aturan dan harmoni dalam sistem, bekerja dalam suatu sifat umum yang bekerja

mendasarkan pada kecenderungan yang berlawanan melalui operasi yang bersifat teratur. Bekerjanya kekuatan yang saling berlawanan dalam suatu hubungan yang bersifat harmoni inilah yang akhirnya menciptakan adanya keseimbangan. Hubungan dan sifat ini juga merupakan analogi dalam teori gravitasi

5. Menurut Newton, sistem alam akan selalu melakukan penyesuaian otomatis (*self adjusting*) dan mencapai keseimbangan secara otomatis (*self equilibrating*). Dalam sistem sosial Smith, *self adjusting* dan *self equilibrating* juga akan terjadi. Penyesuaian dan penyeimbangan secara otomatis ini terjadi karena sifat dasar manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat *original nature (self-interest)* dan *social nature (sympathy)*. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama inilah yang akan menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dalam perilaku individu-individu dalam sistem sosial Smith.

Dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* (WN), Smith dengan sangat jelas menyakini prinsip-prinsip hukum alam tersebut dan melahirkan teori harmoni-nya. Konsep mekanisme pasar yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang berlawanan dan yang secara otomatis akan menciptakan keseimbangan yang diperkenalkan oleh Smith berangkat dari analogi hukum alam tersebut. Namun, sebagaimana Newton yang selalu mengingatkan adanya peran "*The Supreme*", Smith-pun demikian. *The invisible hand* semestinya dilihat dalam konteks filsafat moral Adam Smith.

Memahami filsafat moral Smith hanya dalam konteks mekanisme pasar atau bahkan hanya dalam konteks ideologi kebebasan individual jelas tidak tepat. Oleh karena itu, memahami Smith harus juga melihatnya dalam konteks *natural theology* yang ada dalam bukunya yang pertama, *The Theory of Moral Sentiments* (TMS). Memang tampak agak kontras dengan apa yang ditulisnya di WN, dalam TMS secara eksplisit Smith menempatkan *the original nature (self interest)* dan *social nature (sympathy)* yang ada dalam diri manusia dan sebagai watak dasarnya, analog dengan sifat dasar gravitasi, di mana adanya kekuatan yang berlawanan akan menciptakan keseimbangan. Dalam konteks filsafat, *the invisible hand* tersebut dimunculkan sebagai *sense of self restraint* (pengendalian diri) yang merupakan simpul pengikat antara *self interest* (manusia sebagai individu) dengan *social nature* (manusia sebagai makhluk sosial). Dikemukakan juga bahwa *self restraint* ini berdiri di atas fondasi/ azas *sense of justice* dan *sense of ethic*. Kebebasan individu menurut Smith adalah kebebasan dalam kerangka hukum keadilan (Smith, 1976: 687; Clark, 1992: 48).

Dalam ilmu ekonomi, sifat dasar yang mementingkan diri sendiri (*self interest*) tersebut mewujud dalam bentuk dan orientasi untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya (*maximum utility*) dalam hubungan antar individu. Prinsip keuntungan maksimum dalam teori ekonomi mikro yang kita kenal sebagai asumsi klasik pada dasarnya diturunkan dari sifat dasar tersebut. Sementara, *social nature* dalam hubungan ekonomi mewujud dalam bentuk adanya transaksi atau pertukaran (*exchange*) antar individu karena kedua pihak

memang saling memerlukan. Pasar sebagai media transaksi dengan demikian juga seharusnya merupakan media yang menyeimbangkan kedua sifat dasar tersebut. Oleh karena itu pula, Smith selalu mengingatkan agar setiap individu tidak menyimpang dari hukum keadilan:

*"Hanya kalau setiap individu; yang bebas,
tidak menyimpang dari hukum keadilan, maka
kesejahteraan umum akan dapat dicapai"*
(Smith 1976: 687).

Dengan mengingatkan setiap individu dalam saling berinteraksi di pasar harus tidak menyimpang dari hukum keadilan, Smith sesungguhnya ingin memberi ruang pada aspek-aspek **kelembagaan** bahkan juga dimensi-dimensi sejarah dan budaya dalam perilaku antar individu. Dengan demikian, walaupun dalam analisis sosialnya Smith menggunakan pendekatan *newtonian*, tetapi secara implisit ia sudah menempatkan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial yang **tidak bebas nilai**. Akan tetapi, pemikiran Smith ini kemudian disterilisasi oleh kelompok marginalis yang berkembang setelah Smith. Revolusi utilitas marginal bisa dipandang sebagai tonggak awal dari sterilisasi ilmu ekonomi dari konteks sosialnya.

Metode *newtonian* dalam ilmu ekonomi mencapai puncaknya pada Mazhab Austria dengan tokoh-tokohnya; W.S. Jevons (*Theory of Political Economy*, 1871), Carl Menger (*Principles of Economics*, 1871) dan Mazhab Lausanne dengan tokohnya Leon Walras (*Elements of Pure Economics*, 1874) yang kemudian disintesisikan oleh Alfred Marshall (*Principles of Economics*, 1891).

Perkembangan ilmu ekonomi sesudah Adam Smith tidak bisa dilepaskan dari filsafat **Jeremy Bentham** yang kita kenal sebagai utilitarianisme. Pemikiran-pemikiran Bentham sangat dipengaruhi oleh John Locke dan Newton. Bentham memang tidak seluruhnya sepaham dengan pemikiran Smith, tetapi dalam memandang sistem sosial, ia sama dengan Smith. Ia memandang bahwa sistem sosial diatur oleh hukum alam. Bahkan, ia berkehendak menjadikan *the newton of moral world*. Pemikiran-pemikiran Bentham ini akan memengaruhi pemikiran dalam ilmu ekonomi melalui Stanley Jevons.

Bagi Jevons, ilmu ekonomi adalah sains matematika karena ilmu ekonomi haruslah selalu kuantitatif. Kita perhatikan kutipan berikut:

"... Tidak diragukan lagi, bahwa kesenangan, tenaga kerja, utilitas, nilai, kekayaan, uang modal dan sebagainya semuanya adalah kuantitatif." (Clark, 1992: 119).

Jevons sama sekali tidak membiarkan sejarah memengaruhi perkembangan teori ekonomi. Bahkan dalam teorinya mengenai pertukaran, ia mengemukakan bahwa teori pertukaran dibentuk atas dasar fondasi individual dan fondasi hedonistik. Dalam pandangan Jevons, teori ini merupakan hukum alam, sekaligus ia mengabaikan *social nature*-nya Adam Smith. Di tangan Jevons ilmu ekonomi jelas-jelas merupakan ilmu yang bebas nilai.

Setelah Jevons, fenomena sosial dalam ekonomi diangkat oleh Carl Menger. Menger inilah yang mengangkat *exact law* dalam mencari penjelasan esensi struktur realitas dalam

sistem sosial. Ia membuat perbedaan antara sains teoritis (*theoretical sciences*) dengan sains historis empiris (*historical-empirical sciences*). Dari Menger revolusi *marginal utility* bermula yang sekaligus menandai bermulanya Mazhab Neoklasik.

Perkembangan ilmu ekonomi setelah Jevons dan Menger ditandai oleh pemikiran Leon Walras dengan konsepsinya mengenai keseimbangan umum. Walras sendiri percaya bahwa ilmu ekonomi adalah "*physio-mathematical science*" yang secara lengkap merupakan analogi dari fisika. Oleh karena itu, ia menyatakan:

"... *The law supply and demand regulates on exchanges of commodities just as the law of gravitation regulates the movements of celestial bodies....*". (Clark, 1992)

Perkembangan selanjutnya dalam alam pemikiran Neoklasik dipuncaki oleh Alfred Mashall. Alfred Marshall, merupakan generasi penerus Mazhab Neoklasik yang sampai saat ini menguasai pemikiran ekonomi arus utama. Dengan melakukan sintesis dan pengembangan berbasiskan tradisi marginalis dan pemikiran aliran klasik, ia membangun teori nilai marginal-nya (*Marginal Utility Theory of Value*) yang sangat menguasai pemikiran ekonomi dewasa ini. Bagi para marginalis, *utility* berperan sebagai penggerak dan kekuatan pengatur. *Utility* akan menentukan motivasi dan tindakan manusia. Nilai suatu macam barang ditentukan oleh kelangkaannya dan kelangkaan itu yang akan menentukan *dis-utility* dari mengonsumsi suatu macam barang. Oleh karena itu, nilai suatu macam barang akan ditentukan oleh bekerjanya dua kekuatan hukum alam yang

bekerja secara serentak, yakni; kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran yang akan mencapai keseimbangan karena bekerjanya hukum alamiah.

Dari uraian singkat di atas dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa dasar filosofis pemikiran Neoklasik adalah filsafat utilitarianisme. Asumsi “maksimisasi laba” sebagai tujuan perusahaan atau maksimisasi utilitas dalam teori perilaku konsumen digali dari dasar pemikiran Neoklasik yang merupakan representasi dari *sense of self interest*. Hubungan antar individu dalam pemikiran Neoklasik juga selalu mendasarkan pada asumsi *distrust* dan hubungan yang rasional. Asumsi *distrust* akan termanifestasikan dalam hubungan transaksional yang selalu mendasarkan pada hubungan kontraktual antar agen-agen ekonomi (*agency theory*). Sementara itu, asumsi rasionalitas akan termanifestasikan dalam prinsip-prinsip efisiensi.

Asumsi-asumsi dasar Neoklasik tersebut boleh dikatakan sebagai hasil pemisahan diri ilmu ekonomi dari sistem nilai sosialnya. Dalam perilaku ekonomi mikro khususnya, fokus tertuju pada masalah alokasi yang efisien dari sumber-sumber ekonomi melalui sistem harga dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Bahkan Lionel Robbins secara tegas membatasi ilmu ekonomi menjadi jauh lebih sempit lagi. Menurut Robin:

“Economics is a science which studies human behavior as a relationship between scarce means which have alternative uses”
(Roekmono Markam, 1980; Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins)

Pemisahan ilmu ekonomi dari sistem nilai sosial ini merupakan manifestasi atau bentuk pendekatan metode *cartesian* dalam ilmu-ilmu sosial. Metode *cartesian* akan selalu berangkat dari tesis pemisahan antara **akal** dan **materi**. Oleh karena itu, penerapan metode *cartesian* dalam ilmu ekonomi sekaligus merupakan dasar filosofis **sekularisasi** ilmu ekonomi. Penerapan metode *cartesian* dalam ilmu ekonomi juga merupakan upaya ilmu ekonomi menjadi ilmu sosial yang **bebas nilai** sehingga akan berlaku universal sebagaimana halnya ilmu alam. Dengan cara pandang ini, perekonomian direduksi sebagai struktur yang terdiri dari gerak benda-benda yang mengikuti hukum tarik menarik kekuatan gravitasi. Sebagai akibatnya, hubungan antar individu dipercayai sebagai suatu sistem yang *isolated* dan mekanis yang bisa digambarkan secara obyektif dan deterministik. Perekonomian digambarkan sebagai satu mesin besar yang terdiri dari partikel-partikel.

Dalam alam pemikiran Neoklasik, matematika telah menjadi bahasa yang utama untuk menerjemahkan “korpus” ilmu ekonomi yang bersifat verbal menjadi simbol-simbol matematika. Berkaitan dengan ini Samuelson (Solo, 1991: 98) mengatakan pem-bahasa-an ilmu sosial ke dalam matematika ini untuk membuka pernyataan-pernyataan umum dalam teori menjadi pernyataan definitif untuk diuji dan difalsifikasi melalui prediksi inferensial demi kemajuan ilmu ekonomi menuju kebenaran yang lebih besar. Seiring dengan pemanfaatan matematika untuk abstraksi model perilaku, ilmu ekonomi semakin menjadi steril sebagai ilmu sosial.

Sterilisasi ilmu ekonomi akan membawa ke arah metode analisis yang *un-historic* dan *un-social* (Clark, 1992: 3).

Alasannya sangat jelas dan sederhana. Para ekonom akan mengacu fenomena ekonomi sebagai gejala yang terjadi dalam hukum alam dan bukan fenomena sosial atau proses kelembagaan. Cengkeraman sterilisasi ekonomi Neoklasik ini memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak mahasiswa ekonomi lebih banyak tertarik pada alat (teknik) daripada substansi. Survei yang dilakukan oleh Klammer dan Collander (Collander, 2002) menunjukkan hampir 98 persen mahasiswa ekonomi menjawab bahwa pengetahuan matematika sangat penting. Banyak dari mereka yang percaya bahwa kesuksesan sebagai ekonom datang karena menguasai teknik daripada substansinya. Mahasiswa fakultas ekonomi juga lebih mengenal keseimbangan pasar sebagai bentuk hasil interaksi kurva permintaan dan penawaran daripada mengenal bahwa interaksi tersebut sebagai suatu fenomena ekonomi yang unik, yang mempunyai keunikan proses dalam sejarah waktu dan juga merupakan pengungkapan fakta kelembagaan (yang kemudian disebut “pasar”) bahkan juga merupakan pengungkapan sebuah perilaku moral (*the invisible hand*).

Dalam hal ini saya berpendapat bahwa penguasaan alat matematika, statistika, ekonometrika tetaplah sangat penting. Akan tetapi, menguasai alat tetaplah sebagai media abstraksi untuk mengetahui perilaku. Matematika bukanlah sebagai pengganti pemikiran (Cooter, 1983: 27). Jangan sampai ilmu ekonomi kehilangan relevansinya sebagai ilmu sosial.

Sterilisasi ilmu ekonomi dengan sendirinya menjadikan fenomena-fenomena perilaku yang dinamis terabaikan dalam analisis ekonomi. Padahal ekonomi sebagai suatu sistem sosial akan selalu **berevolusi tergantung pada ekologi sosial** yang

melingkupinya. Oleh karena itu, untuk memahaminya perlu kerangka konseptual yang juga mampu beradaptasi secara terus-menerus. Paradigma *cartesian* dan metode *newtonian* dalam ilmu ekonomi dengan demikian hampir tidak pernah akan bersentuhan dengan realitas-realitas dewasa ini. Nilai-nilai yang muncul dalam model ekonomi kita dewasa ini hanya nilai-nilai yang bersifat kuantitatif, kering, tanpa nuansa dan tanpa konteks. Penekanan pada kuantifikasi ini membuat ilmu ekonomi sangat membatasi teori-teori ekonomi untuk tidak memasukkan dimensi-dimensi ekologi sosial, psikologi aktivitas ekonomi, politik, keadilan yang bersifat kualitatif. Pemisahan ala *cartesian* dan abstraksi kuantitatif *newtonian* inilah yang telah menjauhkan ilmu ekonomi dari realitas sosialnya.

Ilmu Ekonomi dan Keadilan

Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus dihapuskan atau direformasi jika tidak adil (John Rawls, 1995: 1). Utilitarianisme yang menjadi fondasi filosofis dan etis ilmu ekonomi Neoklasik mempunyai implikasi yang luas terhadap perilaku masyarakat. Prinsip dasar utilitarian adalah "*The greatest good for the greatest number*" yang intinya suatu tindakan dikatakan etis kalau memberikan manfaat bagi bagian terbesar orang/ masyarakat. Prinsip ini bisa menjadi legitimasi etis atas kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dengan prinsip itu pula, tirani mayoritas seolah mendapatkan legitimasi etisnya. Di atas filsafat utilitarian ini pula kapitalisme modern Eropa Barat yang mulai tumbuh dan berkembang pada abad ke-18

bersamaan dengan revolusi industri di Eropa mendapatkan dasar filosofisnya.

Prinsip keadilan utilitarian Neoklasik berbeda dengan prinsip keadilan komutatif Adam Smith dan prinsip keadilan John Rawls. Bagi Smith, keadilan komutatif berkaitan dengan pemulihan kembali atas berbagai kerusakan dan kerugian yang terjadi karena transaksi sosial serta berkaitan dengan pertukaran yang *fair*. Prinsip dasar ini mempunyai dua makna sekaligus, yakni; (1) kewajiban untuk mempertahankan hak-hak individual sampai titik di mana ia secara sah dan adil dapat memaksa orang lain untuk mengakui hak-haknya dan (2) kewajiban kita untuk tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Jadi, keadilan komutatif Smith didasarkan pada prinsip *no harm*, *no-intervention* dan *fairness* dalam pertukaran. Oleh karena itu, sistem pasar bebas menjadi mekanisme yang paling layak untuk menciptakan *fairness* tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Buchanan (1983), pertanyaannya kemudian adalah: "Apa itu *fairness*?" Menurut Buchanan, *fairness* berkaitan dengan kontrak dan persetujuan. Aturan yang *fair* adalah ketika para pelaku kontrak bersepakat atas aturan yang berlaku bagi mereka. Jadi, *fairness* berkaitan dengan persetujuan. Meskipun demikian, *fair rule* tidak berkait langsung dengan *justice* (keadilan).

Pada ekonomi pasar, aturan yang *fair* tidak selalu menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Dan dalam realitasnya, hasil atau sumbangan distribusi ekonomi ditentukan oleh keberadaan struktur kelembagaan (Buchanan, 1983: 56). Struktur kelembagaan merupakan suatu sistem interaksi kompleks dari kombinasi pasar dan politik dalam suatu

hubungan interseksional dan tidak jarang menimbulkan konflik. Pada titik pandang seperti itulah, Frank Knight (Buchanan, 1983: 58), mengatakan bahwa dalam ekonomi pasar, hak (*claim*) ditentukan oleh keturunan (*birth*), keberuntungan (*luck*) dan usaha (*effort*). Sementara Buchanan menambahkan satu faktor lagi, yakni; pilihan (*choice*).

Pengakuan atas empat faktor tersebut sebagai determinan distribusi ekonomi merupakan pengakuan atas peran adanya perbedaan bakat atau kapasitas bawaan (*genetic capacities*) yang juga akan berpengaruh terhadap distribusi ekonomi. Pengakuan ini sekaligus merupakan bentuk koreksi atas asumsi dasar Neoklasik akan terdapatnya kesamaan kapasitas bawaan di balik asumsi bekerjanya mekanisme pasar. Berangkat dari sudut pandang itu, keadilan distributif dari suatu proses ekonomi yang berbasiskan pada teori Neoklasik dan mekanisme pasar secara intrinsik akan menciptakan ketidakadilan (*un-justice*). Dalam pendekatan Neoklasik, distribusi hasil merupakan fungsi dari nilai produktivitas marginal dan sumbangan faktor produksi. Dengan ilustrasi sederhana berikut ini, hubungan fungsional tadi dapat dengan mudah dipahami. Apabila:

$$Q = f(K, L)$$

dengan Q adalah nilai output, K adalah faktor produksi kapital dan L adalah faktor produksi tenaga kerja, dan

$$Q = rK + wL$$

dimana r adalah nilai produktivitas kapital dan w adalah nilai produktivitas tenaga kerja, maka distribusi hasil adalah:

$$1 = r \frac{K}{Q} + w \frac{L}{Q}$$

dimana $r \frac{K}{Q}$ adalah bagian hasil yang diterima oleh pemilik kapital dan $w \frac{L}{Q}$ merupakan bagian hasil yang diterima oleh pemilik tenaga kerja.

Pada suatu sistem produksi di mana kapital menjadi yang dominan dan nilai produktivitas kapital menjadi penyumbang terbesar, maka menurut sistem pasar adalah *fair* apabila pemilik kapital mendapat bagian terbesar dalam sistem distribusi hasil. Sebaliknya, karena produktivitas tenaga kerja rendah, maka adalah cukup *fair* pula apabila tenaga kerja hanya mendapatkan bagian yang kecil. Dalam sistem pasar ini, efisiensi bisa dicapai tanpa harus ada jaminan terciptanya keadilan (*justice*). Kiranya dengan contoh berikut ini persoalan akan menjadi lebih jelas. Dalam sistem pengupahan, penetapan upah buruh yang rendah disebabkan adanya anggapan produktivitas buruh yang rendah. Buruh sendiri tidak pernah mengetahui berapa besar produktivitas mereka karena tidak adanya alat penilaian kinerja yang obyektif dan transparan. Sementara, ketika para buruh menuntut kenaikan upah, yang datang kemudian adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ancaman akan diganti tenaga kerja lain yang juga membutuhkan pekerjaan. Bahkan demi peningkatan laba atau mempertahankan laba, para pengusaha tidak akan segan melakukannya dengan tidak menaikkan upah para pekerja. Jika demikian, bisa jadi laba yang diperoleh para pengusaha sebagian adalah bukan miliknya tetapi sesungguhnya adalah milik para

pekerja. Menurut pendapat saya, pola kerja demikian ini merupakan turunan dari pola pikir hampir sebagian besar dari kita sekarang ini.

Pada tataran makro, konsekuensi ekstrim dengan mengikuti pendekatan Neolasik tersebut adalah suatu kewajiban belaka apabila pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi orientasi utama dan dasar strategi kebijakan ekonomi harus dibayar dengan tingginya kesenjangan (*in-equality*) ekonomi dan bahkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian jelas, menurut pendekatan Neoklasik kemiskinan dan kesenjangan merupakan ongkos wajar -dengan begitu juga *legitimate*- dari suatu kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*). Bertitik-tolak dari cara pandang itu pula, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, besarnya tingkat kesenjangan yang terjadi dalam perekonomian kita saat ini adalah "harga wajar" yang harus kita bayar dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini. Benar bahwa strategi tersebut *legitimate* secara teori, tetapi hal ini merupakan ongkos sosial (*social cost*) yang sangat mahal.

Keadilan distributif inilah yang menurut Rawls akan menciptakan ketidakadilan karena setiap orang yang masuk ke dalam sistem pasar dibekali dengan bakat dan kapasitas bawaan yang berbeda, walaupun pasar telah memberikan peluang yang sama kepada setiap individu. Oleh karena itu, bagi Rawls pasar justru merupakan pranata yang tidak adil. Kebebasan pasar hanya memenuhi prinsip keadilan dalam kesamaan hak dan kesamaan kesempatan (*equal treatment for equals*). Atas dasar itulah, Rawls mengajukan **prinsip perbedaan** sebagai prinsip keadilan. Di atas dasar prinsip perbedaan ini, ketidaksamaan

sosial dan ekonomi menjadi dasar etis bagi pemerintah untuk campur tangan dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga pengaturan tersebut akan menguntungkan mereka yang kurang beruntung.

Dengan masih mendasarkan pada prinsip utilitarian, John Stuart Mill mengusulkan perlunya pemerintah mengenakan pajak demi keadilan. Menurut Mill, pajak yang dikenakan haruslah pajak progresif. Dengan semakin banyaknya uang dan juga berbagai bentuk kekayaan lain yang dimiliki seseorang, utilitas marginal kekayaan tersebut semakin menurun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan, pengenaan pajak progresif merupakan instrumen yang adil untuk melakukan redistribusi dari si kaya kepada si miskin. Ini karena, berdasarkan pada prinsip utilitarian, transfer uang dari yang kaya kepada yang miskin akan menjadikan uang tersebut mempunyai utilitas yang lebih tinggi pada yang miskin.

Kelemahan mekanisme keadilan dengan menggunakan pajak ini adalah karena sifatnya yang tidak interpersonal. Kekurangan inilah yang kemudian dilengkapi oleh Vilfredo Pareto (1848-1923). Proposisi Pareto tentang keadilan adalah kenaikan kesejahteraan masyarakat akan terjadi jika kenaikan kesejahteraan (*better off*) satu orang atau lebih tidak menyebabkan pihak lain berkurang kesejahteraannya (*worse off*). Ini berbeda dengan prinsip efisiensi Pareto yang mengatakan bahwa kenaikan kesejahteraan (*better off*) masyarakat akan terjadi hanya jika ada pihak lain yang berkurang kesejahteraannya (*worse off*). Keadilan interpersonal model Pareto ini hanya akan tercipta apabila setiap pelaku yang melakukan interaksi dalam posisi asali yang sama dan terjadi

informasi yang simetris (Dowling dan Valenzuela, 2004: 339). Namun, prinsip keadilan Pareto tetap masih mengandung kelemahan dasar yang sama dengan Neoklasik karena sistem ini tetap mengandaikan berlakunya mekanisme pasar dan kesamaan kapasitas bawaan para pelakunya. Solusi Pareto akan konsisten dengan prinsip keadilan Rawls apabila peningkatan kesejahteraan menurut model Pareto berangkat dari **kendala** pada tingkat kesejahteraan tertentu bagi yang paling tidak beruntung.

Jadi, **keadilan memerlukan peran pasar dan pemerintah sekaligus**. Pemerintah dan pasar harus saling melengkapi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pembangunan harus selalu mempertimbangan interdependensi antara pemerintah dengan pasar. Tugas pemerintah adalah menciptakan aturan main (*rule of law*) agar pasar bekerja efisien (*market-enhancing*) dan sekaligus harus menciptakan perlindungan (*protection*) dan memberdayakan (*empowering*) bagi yang akan tersingkir dan tidak beruntung dalam sistem pasar tersebut. Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi, efisien saja belum cukup, tetapi harus juga melindungi dan memberdayakan.

Menyadari akan perbedaan kapasitas asali dan kemampuan bawaan sebagai perbedaan yang sifatnya alamiah (*genetic capacity and talent*), maka menyerahkan perekonomian sepenuhnya pada sistem pasar tanpa pengaturan pemerintah yang didasari nilai-nilai etis akan justru menyebabkan semakin jauhnya keadilan (*justice*) untuk dapat digapai. Spirit etis inilah yang saat ini diperlukan untuk menjadikan ilmu ekonomi lebih relevan dan tidak terlepas dari nilai-nilai sosialnya. Dengan

demikian, ilmu ekonomi haruslah ilmu yang tidak steril, tidak bebas nilai dan selalu dalam konteks sosialnya. Bahkan menurut Myrdal (Myrdal, 1988), tidak pernah ada ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi, yang netral bahkan juga tidak pernah obyektif.

Etika Ekonomi Abad Pertengahan

Joseph Alois Schumpeter (1954) dalam bukunya *History of Economic Analysis* menyatakan adanya *gap* besar dalam perkembangan ilmu ekonomi antara zaman Yunani dan zaman Skolastik Latin-Eropa. Di antara zaman tersebut, menurut Schumpeter tidak ada tulisan yang relevan mengenai perkembangan ilmu ekonomi. Pendapat demikian tampaknya tidak sepenuhnya benar. Ini terjadi karena Schumpeter tidak terlalu mempunyai perhatian terhadap literatur ekonomi Islam-Arab pada abad pertengahan (Ghazanfar dan Islahi, 1992).

Hampir semua literatur sejarah pemikiran ekonomi yang sampai saat ini kita pelajari jarang sekali membahas mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam abad pertengahan tersebut. Tentunya kita tidak akan membahas semua pemikiran ilmu ekonomi dari tokoh-tokoh abad pertengahan. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan secara ringkas tiga pemikir ekonomi abad pertengahan, yaitu; Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111), Santo Thomas Aquinas (1225-1274) dan Ibn Taimiyah (1263-1328). Perlu saya kemukakan lebih dahulu bahwa tujuan mengemukakan pemikiran ekonomi ketiga “scholar” tersebut adalah bukan untuk membahas isi analisis (*content analysis*) pemikiran ekonomi (apalagi dari aspek teologisnya) dan menganalisis kontroversi interpretatif dari ketiga pemikir tersebut, melainkan saya berharap kita bisa memahami

content metodologi pemikiran ekonomi yang telah mereka kembangkan. Dalam menguraikan pemikiran ketiga tokoh tersebut saya banyak mengacu pada literatur-literatur yang mengupas perbandingan pemikiran ekonomi ketiga tokoh itu (Ghazanfar, 2000; Ghazanfar & A. Azim Islahi, 1992; Yassine Essid, 1992). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali banyak dituangkan dalam bukunya *Ihya' 'Ulumiddin* dan pemikiran Santo Thomas Aquinas dalam *Summa Theologia* (Ghazanfar, 2000) sedangkan pemikiran Ibn Taimiyah dituangkan dalam buku-buku -yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris- *Public Duties in Islam: The Institution of Hisbah (Al-Hisbah fi'l Islam)* dan *Public and Private Law in Islam (al-Siyasah al-Syariyah fi Islah al-Rai wa'l Raiyah)* (Ghazanfar & A. Azim Islahi, 1992).

Isu-isu ekonomi yang dikemukakan Aquinas tertuang dalam *Summa* (II.II. Q77): *On Cheating* yang berkaitan dengan *buying* dan *selling* serta *Summa* (II.II, Q78): *Of the Sin of Usuary* yang berkaitan dengan *loan*. Sementara Al-Ghazali membahas isu-isu ekonomi secara detil (*Ihya' 'Ulumiddin*, jilid 4 bab 3) yang diantaranya meliputi; keutamaan kerja dalam penghidupan, hukum dalam bisnis dan perdagangan, riba, elemen pertukaran, praktik kompensasi, pinjaman dan meminjamkan, kebenaran dan keadilan, kebajikan dalam bisnis dan aktivitas perdagangan.

Ada beberapa kesejajaran dan kesamaan -bukan hanya dalam pilihan topik tetapi juga dalam isi- antara Al-Ghazali dengan Thomas Aquinas (Ghazanfar, 2000: 871-883)). *Pertama*, tentang harga. Harga dalam pandangan Thomas Aquinas adalah harga yang adil (*just price*). "Adalah dosa" begitu dikemukakan oleh Thomas Aquinas jika seseorang menjual

sesuatu lebih dari harga yang adil karena hal itu menipu seseorang dan merugikannya. Kecurangan dalam perdagangan, apakah berwujud pemalsuan pengukuran maupun kualitas adalah haram. Ia memberikan ilustrasi demikian; apabila seseorang menjual seekor hewan yang sakit dan dia sadar akan hal itu serta tidak mengatakannya kepada pembeli, kemudian mengatakan hewan itu sehat, maka dia berdosa dan penjualan itu haram. Dalam hal ini, penjual diikat untuk memberikan kompensasi atas kerugian pembeli. Berkaitan dengan hal ini Thomas Aquinas menekankan pentingnya unsur kejujuran termasuk dalam memberikan informasi pasar (*symmetrical information*) merupakan faktor penting dan harus dipenuhi dalam hubungan transaksi.

Tentang harga, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa adalah bengis dan berdosa menjual barang dengan tipu muslihat pada harga yang lebih dari harga yang berlaku (*prevailing price*). Menurut Al-Ghazali, seseorang harus tidak melakukan kepada yang lain apa yang ia tidak ingin lakukan kepada dirinya sendiri (Ghazanfar, 2000: 872). Barang dijual harus tidak melebihi nilai barang itu, untuk tidak hanya menjadikan dusta tetapi juga kebohongan, karena itu kejam dan berdosa. Para penjual harus jangan mencoba menyembunyikan kerusakan dan kesalahan, sebaliknya, ia harus memberikan informasi secara detil kepada pembeli untuk tidak menjadikan terjadinya kecurangan. Keharusan untuk tidak melakukan kecurangan juga untuk timbangan dan pengukuran jumlah barang serta keharusan untuk sepenuhnya bertindak tepat dan jujur. Bahkan Al-Ghazali menasihatkan jika pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi relatif terhadap harga yang berlaku, penjual seharusnya tidak

menerima karena akan menciptakan keuntungan berlebihan, meskipun menerima harga tersebut tidak menjadikan tidak adil dan tidak ada kecurangan. Ia sangat menuntut perilaku para pelaku pasar seharusnya selalu berbuat kebajikan (*ihsan*). (ket: penjelasan mengenai pemahaman harga yang adil ini juga dapat dilihat dari H.R. at-Tirmizi No.1235 pada CD-ROM Mawsu'ah al-Hadits; *Buletin Dakwah*, 15 Desember 2000)

Kedua, tentang riba (*usury*). Riba mungkin menjadi subyek yang paling banyak didiskusikan dan banyak kontroversi dalam perdebatan di abad pertengahan. Dalam pandangan Thomas Aquinas, uang diciptakan terutama untuk tujuan pertukaran. Konsekuensinya, prinsip penggunaan uang adalah untuk konsumsi. Oleh karena itu, tidak sah mengambil pembayaran dari meminjamkan uang atau yang dikenal sebagai riba. Sedangkan menurut Al-Ghazali, mengenakan bunga berarti membelokkan uang dari fungsinya. Praktik riba adalah sebuah pelanggaran atau dosa karena uang diciptakan tidak untuk dirinya sendiri. Uang ibarat cermin yang tidak berwarna tetapi merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan semua harga (lihat juga: Adiwarman Karim, 2002: 10). Apabila seseorang menjual uang dengan uang (untuk mendapatkan "*gain*") dan transaksi itu menjadi tujuannya, uang tersebut akan terpenjarakan.

Baik Thomas Aquinas maupun Al-Ghazali masih banyak membahas aspek-aspek ekonomi lain, seperti; nilai dan harga, keuntungan yang wajar, hak milik pribadi, pemalsuan dan penurunan nilai uang (inflasi). Terhadap masalah keuntungan, pandangan Thomas Aquinas memang tidak terlalu tegas sebagaimana pandangan Al-Ghazali. Menurut Thomas Aquinas,

keuntungan dari para pedagang dan penukar uang selalu mempunyai implikasi kerugian terhadap pihak lainnya dan karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan komutatif. Sementara, meskipun Al-Ghazali jelas-jelas berpendapat bahwa motif dibalik aktivitas ekonomi adalah keuntungan, ia mengkritik keuntungan yang berlebihan. Al-Ghazali mengusulkan keuntungan wajar (antara 4 persen – 10 persen dari harga barang). Apabila kemudian terjadi kelebihan keuntungan (*excess profit* atau mungkin sama dengan *economic profit* menurut Mazhab Klasik) karena suatu kekeliruan maka mereka harus memberi secara karitatif (Ghazanfar, 2000: 879). Pandangan mengenai keuntungan yang wajar ini sejajar dengan konsep keuntungan normal yang dikenalkan oleh Adam Smith enam abad kemudian. Tentang pemalsuan uang dan penurunan nilai uang, Thomas Aquinas tidak menjelaskan banyak. Sedangkan Al-Ghazali memberikan cukup banyak pandangan mengenai pemalsuan ini dengan mengatakan bahwa pemalsuan uang bukan hanya sebagai dosa individual melainkan juga secara nyata membahayakan masyarakat melalui transaksi-transaksi yang menggunakan uang palsu tersebut (Ghazanfar, 2000: 880)

Pemikir ekonomi abad pertengahan lain yang menurut saya harus mendapat tempat dalam pembelajaran ilmu ekonomi adalah Taqi al-Din Ahmad bin'Abd al Halim atau yang lebih dikenal dengan Ibn Taimiyah. Dalam pemikiran ekonomi-nya (*Ibn Taimiyah's Economic Thought*), Ibn Taimiyah menyajikan diskursus yang sangat luas yang meliputi banyak bidang dalam suatu pendekatan yang holistik dengan perspektif filsafat, religius, etika, sosiologis dan tentunya ekonomi. Oleh karena

itu, sangatlah tidak mengherankan apabila diskursus ini mencakup banyak bidang, seperti; peranan uang, hak-hak kepemilikan pribadi, peranan sektor publik (termasuk pengaturan harga), keuangan negara, bentuk-bentuk organisasi bisnis, masalah distribusi pendapatan dan kekayaan, kemiskinan dan masih banyak yang lain. Tentunya pada kesempatan ini, kita hanya akan membicarakan beberapa saja diantaranya.

Walaupun tidak menggunakan istilah yang eksplisit seperti halnya ekonomi klasik, Ibn Taimiyah telah mengemukakan terminologi "kompetisi" dalam operasi kebebasan pasar. Ia menekankan pentingnya kebebasan untuk masuk dan keluar (*free entry – exit*) pasar. Ia pun mengkritik kolusi antara penjual dan pembeli. Ia menekankan pentingnya pengetahuan mengenai pasar bagi para pelaku, sekaligus menekankan kejujuran, permainan yang *fair* dan kebebasan sebagai esensi yang harus ada (bandingkan dengan pasar persaingan sempurna dalam ekonomi klasik). Di samping memahami dengan baik fungsi dari pertukaran sukarela dan bagaimana permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga, Ibn Taimiyah juga memahami dengan baik faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan dan penawaran sekaligus tidak perlunya campur tangan pemerintah di pasar tanpa adanya alasan yang kuat seperti ketidaksempurnaan atau karena adanya kejadian seperti perang. Di bagian lain, ia menekankan perlunya regulasi dan kontrol terhadap harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar (praktik monopoli). Ia tidak terlalu percaya dengan mekanisme pasar otomatis (*self regulating market mechanism*) meskipun ia

menyarankan perlunya pasar yang kompetitif.

Dengan kembali kepada sejarah pemikiran ekonomi abad pertengahan tersebut, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa ilmu ekonomi mempunyai dasar-dasar etis yang sangat kuat. Uraian di atas memberikan ilustrasi akan arti penting dan peran agama, moral, etika dan tata nilai dalam metodologi ekonomi abad pertengahan, baik dari pemikir ekonomi Latin-Eropa maupun Islam-Arab. Sebab, sesungguhnya tidak ada ilmu sosial atau cabang riset sosial yang dapat berpura-pura "a-moral" atau "a-politik" (Myrdal, 1988). Kita juga sekaligus dapat melihat adanya kesejajaran dan kesamaan pemikiran -di luar perbedaan yang ada- dari para pemikir ekonomi tersebut baik antar pemikiran mereka maupun dengan pemikiran ekonomi pada abad-abad sesudahnya. Dari perspektif sejarah pemikiran, kita juga melihat bahwa *great gap* yang menciptakan keterputusan perkembangan pemikiran dari masa Yunani ke Skolastik sebagaimana dikemukakan Schumpeter terjawab sudah.

Yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah semua pemikir ekonomi abad pertengahan tersebut selalu menempatkan **keadilan** sebagai spirit etis dalam setiap aktivitas ekonomi suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal ini pula, pertanyaan lain yang relevan dikemukakan adalah apakah terdapat interaksi kausal antara nilai-nilai religiusitas dalam agama dengan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Menurut Baro dan McCleary (2002) terdapat dua kemungkinan arah kausalitas hubungan antar keduanya. Pertama berdasarkan hipotesis sekuler yang berpandangan bahwa nilai-nilai religiusitas dalam agama merupakan variabel endogen. Kedua,

mengikuti tesis Weber (Baro and Mc.Cleary, 2002: 11; Weber, 2006) bahwa nilai-nilai agama akan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap pembangunan ekonomi atau dengan kata lain menyatakan nilai-nilai agama merupakan variabel eksogen. Dalam hal ini, saya mengikuti pandangan yang kedua, yaitu nilai-nilai religiusitas dalam agama merupakan variabel eksogen dan menjadi spirit etis dalam pembangunan ekonomi. Secara implisit saya berpendapat bahwa nilai-nilai etis tersebut seharusnya terinternalisasi dalam setiap aktivitas dan kebijakan ekonomi.

Kebijakan Ekonomi, Demokrasi dan *Rule of Law*

Etika ekonomi abad pertengahan selalu menempatkan keadilan sebagai titik sentral sekaligus pengikat dalam setiap aktivitas ekonomi. Dan sumber nilai tersebut adalah moralitas agama. Bagaimana menjadikan spirit etis tersebut sebagai landasan dalam kebijakan ekonomi? Apakah ilmu ekonomi masih mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang kita hadapi?

Pendekatan positivistik telah membawa kita pada konsep “bebas nilai” dalam ilmu pengetahuan. Ideologi kebebasan individual dan prinsip maksimisasi utilitas telah melahirkan pragmatisme dan perilaku hedonis. Sterilisasi atas fenomena ekonomi dari konteks sosialnya inilah yang telah menjadi salah satu sumber penyebab utama krisis ekonomi di Indonesia.

Pragmatisme dan hedonisme telah mendorong terjungkirbaliknya norma-norma dan etika. Berbagai macam kasus yang terjadi dalam bidang ekonomi memberi gambaran

betapa norma dan etika tersebut telah banyak diabaikan. Kebangkrutan industri perbankan hanya dipandang sebagai kesalahan dalam manajemen dan bukan karena kesalahan paradigma serta *moral hazard*, khususnya dalam penyaluran kredit kepada perusahaan sendiri. Hutang luar negeri yang saat ini mencapai 128 miliar dolar AS yang menyebabkan beban berkepanjangan dalam APBN dan defisit fiskal hanya dilihat sebagai akibat ketidakmampuan sumber-sumber domestik dan tidak dilihat sebagai akibat praktik perilaku korup, dan buruknya pengelolaan keuangan negara. Penguasaan industri oleh segelintir pengusaha dan struktur industri manufaktur yang oligopolistik dipandang sebagai fenomena ekonomi dan hasil dari suatu mekanisme pasar dan bukan dilihat karena struktur sosial dan kelembagaan yang tidak adil. Kehancuran kurs dipandang sebagai fenomena pasar uang yang hanya digerakkan oleh aliran modal dan bukan dilihat karena ketimpangan struktural antar negara dan dominasi oleh kekuatan modal. Korupsi dan sogokan dianggap sebagai suatu kewajaran karena diakui sebagai biaya wajar yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks hubungan prinsipal-agen (Dowling dan Valenzuela, 2004: 330; Ari Kuncoro, 2004). Berbagai kesalahan diagnosis dalam melihat persoalan tersebut menjadikan “resep” yang sering diberikan tidak tepat bahkan *over dosis* atau sama sekali salah dan justru menjadikan penyakit bertambah parah (Stiglitz, 2002: 104).

Kita memang telah mampu melompat dari bangsa yang berpenghasilan rendah ke bangsa berpenghasilan menengah. Antara tahun 1970 hingga awal tahun 1990-an, kita mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata cukup tinggi, yakni 7,21 persen.

GDP perkapita meningkat dari 81,34 dolar AS pada tahun 1970 menjadi 1.262,56 dolar AS pada tahun 1997 (sebelum krisis ekonomi akhir tahun 1997 mulai terasa). Tingkat inflasi juga bisa dijaga pada tingkat selalu di bawah dua *digit*. Akan tetapi, pada periode yang sama hutang luar negeri meningkat, dari 47,98 juta dolar AS pada 1973/1974 menjadi 136,09 miliar dolar AS pada tahun 1997. Struktur industri dalam kurun waktu tersebut cenderung mengarah pada struktur yang oligoplistik bahkan duopolistik. Rasio konsentrasi (*Consentration Ratio*: CR) untuk industri menengah dan besar masih sangat tinggi. Hingga tahun 2000, rata-rata CR 4 adalah 94 persen dan bahkan CR 2 masih sebesar 86,88 persen. Tingkat kemiskinan meskipun sudah menurun masih cukup tinggi, dari 40,1 persen atau sebanyak 54,2 juta orang pada tahun 1976 menjadi 11,3 persen atau 22,5 juta orang pada tahun 1996. Tingkat pengangguran justru semakin meningkat. Jika pada tahun 1980-an rata-rata tingkat pengangguran berkisar 2,5 persen, pada akhir 1990-an berkisar pada angka 5 persen.

Memasuki milenium kedua, perubahan-perubahan besar memang telah terjadi. Gerakan reformasi menjelang akhir abad ke-20 yang harus kita pandang sebagai momen kritis atau titik balik perubahan (*turning point of change*) telah mampu membawa iklim perubahan baik dalam politik maupun ekonomi menjadi lebih demokratis. Meskipun demikian, persoalan-persoalan dasar ekonomi kita masih tetap belum banyak berubah. Di akhir tahun 2006, menurut hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE-06) jumlah orang miskin di Indonesia masih 39,05 juta orang atau sekitar 17,75 persen (Maret 2006). Jumlah tersebut akan membengkak lagi kalau kita masukkan juga

kelompok hampir miskin yang mencapai 13,02 persen dan kelompok hampir tidak miskin sebesar 27,84 persen. Jadi, lebih dari 58,61 persen penduduk Indonesia adalah penduduk miskin dan rentan untuk menjadi miskin. Gambaran ini menjadi lebih dramatis kalau kita mengacu laporan Bank Dunia (2005) yang menunjukkan lebih dari 110 juta orang Indonesia berpenghasilan kurang dari 2 dolar AS perhari. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Malaysia ditambah penduduk Kamboja dan Vietnam. Laporan Bank Dunia tersebut juga menunjukkan tingginya tingkat kematian ibu hamil di Indonesia yang rata-rata dua kali tingkat kematian ibu hamil di Filipina dan lima kali tingkat kematian ibu hamil di Vietnam. Masalah besar lain yang masih kita hadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Badan Pusat Statistik (2006) mencatat tingkat pengangguran saat ini mencapai sekitar 10,28 persen atau sekitar 10,93 juta orang adalah menganggur terbuka (bekerja paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu). Tentunya persoalan ketenagakerjaan ini semakin berat apabila kita juga memperhitungkan orang yang setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu) yang jumlahnya sekitar 37,98 persen atau sekitar 42,12 juta orang.

Fondasi ekonomi sebagai prasyarat untuk tumbuh dalam jangka panjang masih belum kuat. Indikatornya jelas, daya saing Indonesia relatif masih sangat rendah. Dalam urutan daya saing menurut *IMD Competitiveness Year Book 2006*, posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-60 dari 61 negara yang dicatat oleh lembaga tersebut. Lemahnya daya saing ini berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi (S.J Wei, 1999). Wei dalam

studinya di Asia menunjukkan bahwa korupsi akan cenderung menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, menurunkan penerimaan pajak, menurunkan pertumbuhan dan mengurangi investasi luar negeri. Di Asia, korupsi berkorelasi negatif dengan tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan menganggap bahwa studi Wei benar, maka hambatan terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan kemiskinan di Indonesia sangat berat. Kualitas birokrasi yang buruk dan rendahnya komitmen untuk menaati azas-azas *good governance* masih menjadi hambatan untuk menyelesaikan persoalan dasar tersebut. Menurut survei *Transparency International (TI)*, tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2006, posisi Indonesia ada pada urutan ke-130 dari 163 negara yang disurvei TI, dengan skor 2,4 dari skor tertinggi 10. Skor 10 adalah skor yang menunjukkan negara yang relatif paling bersih dari korupsi (<http://www.transparency.org>).

Keempat agenda yang sudah dibahas di atas, yakni; **penghapusan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan daya saing perekonomian** dan **pemberantasan korupsi** harus menjadi *platform* bersama dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari ketertinggalan. Empat agenda tersebut merupakan akibat kebijakan ekonomi yang tidak adil. Untuk itu, perlu dilakukan revisi atas *roadmap* strategi pembangunan ekonomi yang telah kita pilih selama ini.

Strategi pertumbuhan yang kita pilih dalam tiga dekade terakhir abad ke-20 telah banyak memberi pelajaran akan perlunya perubahan orientasi. Pemikiran akan perlunya perubahan strategi ini sesungguhnya sudah mulai muncul pada

tahun 1970-an ketika strategi pertumbuhan ekonomi yang dijadikan acuan oleh banyak negara berkembang justru menciptakan ketidakadilan dan ketidakmerataan. Oleh karena itu, mereka menyerukan perlunya perubahan yang fundamental secara politik dan institusional sebagai syarat untuk menciptakan pemerataan (Irma Adelman dan Morris, 1973 dalam Bintoro, 1980). Kemiskinan maupun ketidakmerataan merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang secara struktural eksis.

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sudah seharusnya bergeser, dimulai dengan orientasi terhadap **peningkatan keadilan** dan **pemerataan** dengan menempatkan penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama pembangunan. Pergeseran orientasi strategi pembangunan ini yang oleh Meier (2001) disebut sebagai pergeseran teori pembangunan generasi pertama dan generasi kedua menuju generasi baru teori ekonomi pembangunan. Pangkal tolak pemikiran paradigma ini adalah bahwa kegagalan penyelesaian masalah-masalah fundamental di negara-negara berkembang bukan hanya disebabkan oleh kegagalan pasar, bukan pula karena kegagalan faktor kebijakan, tetapi juga karena kegagalan institusional (*institutional failures*). Premis pendekatan ini adalah faktor kelembagaan akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan (*institution matters*). Penekanan faktor kelembagaan ini adalah pada proses perubahan yang merupakan fungsi dari struktur kelembagaan dalam masyarakat (North, 2006). Kelembagaan menurut Douglass North adalah aturan main (*rule of the game*) yang berlaku di masyarakat, baik formal seperti undang-undang,

hukum dan peraturan, maupun nonformal seperti norma-norma yang berlaku, kebiasaan dan adat-istiadat. Perubahan pola distribusi juga termasuk di dalam perubahan kelembagaan. Penekanan atas arti penting faktor kelembagaan ini menunjukkan bahwa untuk memecahkan masalah fundamental tersebut selain diperlukan faktor modal, sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, juga faktor modal sosial, baik modal sosial kewargaan (*civil social capital*) seperti saling mempercayai (*trust*), saling menghargai (*tepo-seliro: jw*), kerjasama, musyawarah maupun modal sosial pemerintah (*government social capital*) seperti peraturan, hak kepemilikan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penempatan kedua tujuan tersebut; penghapusan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran, sebagai titik tolak perencanaan strategi mempunyai implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai syarat utama. Pertumbuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tersebar atau berbasis luas (*broad-based economic growth*). Karena jumlah orang miskin paling banyak di daerah pedesaan dan di sektor pertanian serta tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi diantara berbagai kelompok pendapatan dan pekerjaan di pedesaan (BPS: SNSE, 2003), *broad-based economic growth* ini dimaksudkan untuk mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan sekaligus dapat menurunkan tingkat ketimpangan diantara berbagai kelompok dan daerah (Poramettee Vimolsiri, 1999: 308). Strategi *broad-based economic growth* juga harus menyentuh bidang usaha mikro dan kecil (UMK), karena bagian terbesar dari masyarakat miskin berada pada usaha-usaha UMK. Implikasinya, kebijakan-

kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan UMK harus dilakukan sebagai bentuk pemihakan terhadap keadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas barulah merupakan keharusan pertama (*necessary conditions*) karena masih diperlukan syarat kecukupan (*sufficient conditions*), yakni; demokrasi dan aturan main (*rule of law*) yang mampu menciptakan keadilan (*justice*). Pertumbuhan ekonomi yang *sustain*, hanya akan terjadi kalau ia tercipta dalam suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis (Boediono, 2007). Banyak studi empiris menunjukkan bahwa demokrasi merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas birokrasi secara substansial berkorelasi kuat dengan demokrasi. Semakin kuat lembaga-lembaga demokrasi seperti media massa yang selalu memantau perilaku birokrasi yang korup, semakin tinggi kualitas birokrasi (Alesina, 1997; Rivera-Batiz, 1999). Dari studi Rivera-Batiz pula ditunjukkan bahwa semakin baik kualitas pemerintahan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, yang ditunjukkan melalui peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP). Memang, masih sering terjadi beda pendapat mengenai kausalitas antara demokrasi dengan pertumbuhan tersebut, tetapi tidak bisa ditolak bahwa demokrasi akan mendorong perbaikan kualitas birokrasi. Demokrasi akan mendorong meningkatnya keterbukaan, keterbukaan akan mendorong kompetisi dan kebebasan arus informasi dan meningkatnya kebebasan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan masyarakat (Tim Kane, Kim R Holmes, Mary A. O'Grady, 2007).

Selain demokrasi, *rule of law* menjadi syarat kecukupan lain untuk tumbuhnya ekonomi yang *sustain* dan berbasis luas.

Studi empiris yang dilakukan Barro (1996) menunjukkan bahwa *rule of law* merupakan determinan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan *rule of law* yang semakin baik, akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan demokrasi justru mempunyai pengaruh yang lebih kecil dan bersifat tidak linier. Pertanyaannya kemudian adalah, mana yang harus lebih dulu, demokrasi atau pelaksanaan *rule of law* yang lebih baik?

Dalam pandangan saya, tidak harus ada ambiguitas, keduanya harus berjalan secara simultan karena, baik proses demokrasi maupun pelaksanaan *rule of law* berkaitan dengan transformasi kelembagaan. Kelembagaan dalam hal ini kita artikan sebagai *rule of the game* (North, 2006). Jadi, kelembagaan berkaitan dengan *construct of the human mind*. Kelembagaan ini meliputi aturan formal seperti hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun informal seperti tradisi maupun kebiasaan (Rao, 2003). Apresiasi terhadap aspek kelembagaan ini akan menentukan kinerja perekonomian karena kelembagaan mempunyai fungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan pada saat yang sama akan mendorong terciptanya *good governance* dalam birokrasi. Kalaupun kita harus memilih mana yang lebih dulu antara demokrasi dan pelaksanaan *rule of law*, saya akan menempatkan demokrasi sebagai yang lebih dulu. Sebagai ilustrasi saya berikan contoh berkaitan dengan persetujuan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang baru disahkan tahun 1999. Walaupun proses pembahasan mengenai RUU tersebut hanya berlangsung kurang dari satu tahun, tetapi proses politik dan rencana usulan akan perlunya UU Anti Monopoli tersebut sudah

dimulai sejak pertengahan kedua tahun 1980-an. Rencana usulan UU Anti Monopoli ini selalu gagal karena kekuatan politik terbesar saat itu masih cenderung menolak rencana tersebut dan baru setelah reformasi politik bergulir tahun 1997, usulan tersebut mulai mendapat persetujuan dari partai-partai politik, yang akhirnya disetujui menjadi undang-undang.

Akhirnya saya sampai pada kesimpulan: untuk mencapai tujuan pembangunan yang *sustain* yang mampu memecahkan masalah kemiskinan melalui strategi *broad-based economic growth*, diperlukan bukan hanya kebijakan yang benar, melainkan juga *rule of law* dan *rule of the game* yang benar. Peran pasar dan pemerintah harus saling melengkapi karena diantara keduanya ada saling ketergantungan. Reformasi ekonomi, politik dan sosial yang berlangsung pada akhir masa orde baru merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menjamin sustainability pembangunan ekonomi dengan basis strategi *broad-based economic growth*. Untuk menjaga dan menjamin agar strategi tersebut berada pada jalur yang benar (*on the right track*), proses dan transisi demokrasi yang saat ini masih berlangsung harus tetap dapat dipertahankan sehingga kita dapat dengan sukses sampai pada suatu masyarakat demokratis yang substansial.

Sebagaimana juga sudah diingatkan oleh Stiglitz (2002), fenomena ekonomi adalah fenomena sosial dan karena itu haruslah dipandang dalam kesatuannya sebagai sebuah sistem sosial dan bukan mekanistik. Sebuah perekonomian bukanlah sebuah mesin besar dengan elemen-elemennya yang bisu. Ia adalah sebuah sistem dengan nilai-nilai yang hidup dalam atmosfer budaya, sosiologi, politik dan kelembagaan yang saling

berinteraksi. Oleh karena itu pula, ilmu ekonomi tidak akan bisa bekerja sendiri dalam memecahkan berbagai masalah sosial tersebut. Para ekonom, walaupun tetap bekerja dengan menggunakan model yang rumit dan canggih, tetaplah harus berpijak pada nilai-nilai etika dan keadilan sebagaimana diingatkan Adam Smith dan pemikir ekonomi abad pertengahan.

Kalau tadi saya katakan bahwa penggunaan matematika, statistika, input-output, ekonometrika dan berbagai teknik analisis lain dalam ilmu ekonomi harus tetap selalu berpijak pada nilai-nilai etika, bukan berarti saya menolak teknik-teknik analisis tadi. Saya juga tidak ingin menimbulkan kesan bahwa teknik tersebut tidak diperlukan sebab dalam analisis ekonomi ketrampilan teknis sangat penting. Bahkan dengan penggunaan teknik analisis tersebut, ilmu ekonomi telah mendapatkan mahkota penghargaan dan pengakuannya yang sangat tinggi melalui para peraih hadiah Nobel. Akan tetapi, masalah-masalah pembangunan saat ini justru semakin kompleks dan menuntut penyelesaian yang berdasarkan pada riset-riset dengan pendekatan multidisiplin atau bahkan transdisiplin. Para sarjana ekonomi saat ini justru dituntut untuk semakin membuka diri terhadap disiplin lain. Untuk dapat mengenal persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan dengan lebih baik, para sarjana ekonomi sudah seharusnya bersedia belajar tentang studi kelembagaan dan sejarah. Walaupun saya menyadari betul bahwa tidak semua variabel bisa dikuantifikasi, kepada mereka yang secara intensif mendalami teknik-teknik analisis kuantitatif, saya berharap anda semua mau bekerja keras agar model-model kuantitatif yang dibangun mampu merefleksikan hubungan antar variabel yang

lebih realistik dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dengan sedapat mungkin mengadaptasi aspek sosial kelembagaan, bukan justru mempersempit dengan memasukkan asumsi-asumsi yang malah semakin jauh dari kenyataan.

Karena itu, benarliah apa yang dikatakan Keynes bahwa sarjana ekonomi yang baik haruslah seorang matematikawan, statistikawan, ahli sosiologi, psikologi dan sejarah. Bahkan menurut saya, seorang ekonom seharusnya adalah budayawan dan filsuf sekaligus. Jelaslah, hanya seorang jenius yang mampu memenuhi semua persyaratan tersebut. Akan tetapi, marilah kita menyadari legitimasi ilmu ekonomi hanya akan datang apabila ilmu ekonomi mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai ilmu ekonomi hidup kesepian dan kehilangan relevansi di tengah-tengah pergulatan masalah di sekitarnya. Tuntutan ini tentu mempunyai implikasi yang luas terhadap pengajaran dan pendidikan ilmu ekonomi ke depan.

Bertitik tolak dari situasi tersebut, secara jujur saya katakan kekhawatiran saya melihat kecenderungan saat ini. Di saat kita memerlukan pendekatan multidisiplin, bahkan transdisiplin dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang terpicu oleh semakin berkurangnya kohesivitas sosial, di sisi lain kecenderungan sterilisasi dan pengkotak-kotakan dalam pendidikan dan pengajaran ilmu sosial masih sangat kuat. Memang, kita para sarjana ekonomi tidak harus menjadi generalis, tetapi akan sungguh naif apabila para calon sarjana ekonomi dianggap tidak perlu mengetahui ilmu budaya, ilmu alam, ilmu sosiologi dan ilmu politik pada

tingkat yang paling dasar sekalipun, sehingga cabang-cabang ilmu tersebut tidak perlu diajarkan dan dipelajari oleh para calon sarjana, khususnya sarjana ekonomi. Indikasi ini tampak pada hilangnya mata kuliah-mata kuliah ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar dari kurikulum wajib pada beberapa tahun ajaran belakangan ini. Bagaimana mungkin sarjana ekonomi yang adalah sarjana ilmu sosial mampu memecahkan masalah sosial tanpa memahami akar masalah yang dihadapinya secara cukup? Agar ilmu ekonomi menjadi lebih relevan, ilmu ekonomi harus mampu menjalin interrelasi dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Memang kita harus meningkatkan kompetensi para calon sarjana ekonomi, tetapi upaya peningkatan kompetensi tersebut tidak harus berarti mencabut para calon sarjana ekonomi dari akar sosialnya.

Pandangan saya, masalah-masalah sosial dalam suatu masyarakat hanya dapat dipecahkan dengan memahami masalah tersebut dalam konteks sosiologisnya. Sejarah telah mengajarkan banyak kepada kita tentang kebijaksanaan. Pengalaman telah memberikan kita cukup banyak pengetahuan. Saatnya sekarang kita untuk kembali ke jati diri ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Pandangan bahwa ilmu adalah bebas nilai, tidak selalu melahirkan kebijakan yang benar. Spirit pemikiran ekonomi abad pertengahan memberikan *message* ilmu ekonomi haruslah tidak sekuler. Ilmu ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang merupakan internalisasi nilai dan spirit religiositas. Alangkah miskinnya kita, apabila kita yang telah memilih ekonomi sebagai profesi, kehilangan sejarah kita sendiri (*lost of historical*) dan menjadi ekonom yang tidak punya kepekaan sejarah (*lost of historical sense*).

Pesan dan Ucapan Terimakasih

Kepada para mahasiswa atau siapa saja sebagai pembelajar ilmu ekonomi, saya berharap anda selalu terbuka dan peka terhadap segala macam aspek persoalan masyarakat kita dan jangan pernah kehilangan kreatifitas hanya karena takut berbuat salah. Milikilah keberanian untuk menggunakan akalmu sendiri, begitu kata Emanuel Kant. Andai itu tidak terjadi, saya khawatir proses pendidikan ini menjadi proses yang sia-sia karena hakikat pendidikan adalah transformasi, dan transformasi tidak akan pernah terjadi kalau pendidikan itu hanya menghasilkan “robot-robot” dan tidak memerdekakan manusia.

Akhirnya, saya harus mengemukakan keprihatinan saya yang lain yang boleh kita anggap sebagai pesan untuk kita bersama. Tampaknya perilaku pragmatis dan hedonis-pun telah mulai masuk ke dunia perguruan tinggi yang seharusnya menjadi salah satu penjaga moral dan kejujuran. Sebagai guru, saya harus mengatakan hal ini walau mungkin terasa menyakitkan. Kebiasaan untuk mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri sudah mulai banyak kita temukan, entah itu berupa skripsi, tesis atau karya ilmiah lainnya yang mestinya merupakan produk intelektual yang berbobot nilai-nilai kejujuran. Bisa jadi hal ini merupakan cerminan wajah masyarakat kita yang **ingin serba cepat, yang lebih mementingkan hasil dan tidak memedulikan proses**, sehingga mulai tidak memedulikan lagi nilai-nilai etika dan moralitas. Saya tidak mempunyai resep lain kecuali kita harus lebih peduli untuk selalu menginternalisasikan nilai-nilai etika dalam proses pendidikan dan pembelajaran sekaligus merenungkan kembali ajaran leluhur kita yang tertuang dalam “Serat Wedhatama” melalui bait tembang PUCUNG

berikut: *Ngelmu iku kelakone kanthi laku, Lekase lawan kas, Tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing dur angkara* (yang artinya kira-kira adalah: ilmu pengetahuan harus dicari dengan kerja keras, mulai dengan kesetiaan, tugas ilmu yang utama adalah untuk membasmi angkara murka). Begitulah memang ciri ilmuwan; setia pada cita-cita.

Sebelum mengakhiri pidato saya, berkenankan saya mengungkapkan syukur dan terimakasih saya kepada orang-orang baik yang telah ikut mewarnai perjalanan hidup saya hingga saat ini. Walaupun pencapaian jabatan akademik sebagai Guru Besar adalah suatu tahapan wajar bagi setiap orang yang secara sadar telah memilih menjadi dosen sebagai profesinya, namun saya sangat yakin pencapaian tersebut juga karena peran banyak pihak. Untuk itu secara tulus saya sampaikan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan tentunya juga guru-guru saya sejak saya mulai mengenal sekolah hingga saat ini, sebab tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di universitas tercinta ini.

Terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro, Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS Med, Sp.Amd dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro yang telah menerima pengangkatan saya sebagai Guru Besar dan terlebih telah menilai saya layak untuk diterima sebagai anggota Senat Guru Besar di Universitas Diponegoro. Kepada Dekan/ Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Bapak Dr. HM. Chabachib, M.Si. Akt dan seluruh anggota Senat Fakultas

Ekonomi Universitas Diponegoro beserta seluruh pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro saya mengucapkan terimakasih atas persetujuan dan dukungan dari saat saya mulai mengajukan usulan untuk jabatan Guru Besar ini hingga acara pengukuhan saya pada hari ini. Terimakasih saya sampaikan kepada mantan Rektor/ Ketua Senat Bapak Prof. Ir. Eko Budihadjo, M.Sc, sekretaris Senat Universitas Diponegoro, Bapak Prof. dr.H. Soebowo, DSPA yang telah memroses dan memantau hingga disetujuinya Surat Keputusan Guru Besar saya.

Kepada ketua dan anggota *peer group* Penerimaan Guru Besar saya: Bapak Prof. Dr. Miyasto (Ketua), Bapak Prof. dr. H. Soebowo, DSPA, Bapak Prof. Drs. H. Arifin Sabeni, M.Com, Akt, PhD, Ibu Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D, Bapak Prof. Dr. Lachmudin Sya'rani, Bapak Prof. Drs. Soedjarwo dan Bapak. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D, saya mengucapkan banyak terimakasih atas masukan-masukan yang sangat baik dalam kaitan penyiapan naskah pidato saya ini. Ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Miyasto yang selain sebagai ketua *peer group*, juga telah memberikan rekomendasi untuk pengajuan Guru Besar saya dan berkenan menjadi Promotor saya pada saat saya menempuh program doktor. Terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Daniel Kameo, MA (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji (Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang juga telah memberikan dukungan kepada saya dalam pengajuan jabatan guru besar ini. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Prof. Dr. IB. Santika (Universitas Airlangga, Surabaya), Prof. Dr. H.

Hary Susanto (Universitas Brawijaya, Malang) yang ikut mewarnai perjalanan intelektual saya melalui banyak kesempatan untuk berdiskusi mengenai banyak hal selama saya menempuh program doktor.

Kepada para senior dan guru-guru saya; Bapak Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo, Bapak Drs. H. Daryono Rahardjo, MM, Bapak Drs. Wiratno, M.Ec, Bapak Prof. Dr. Soewito (Alm), Bapak Drs. B. Soenardi (Alm), Bapak Drs. GB. Pakpahan, MM, Bapak. Drs. Mugihadjo, Bapak Prof. Ir. Joetata Hadihardaja, saya haturkan banyak terimakasih atas kesempatan, bantuan dan dukungannya sejak saya diterima menjadi dosen hingga saat ini. Kepada Bapak Prof. Roekmono Markam, SH dan Bapak Dr. Budiono Srihandoko dari Universitas Gadjah Mada, saya sangat berterimakasih atas dukungan ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi asisten selama masih menjadi mahasiswa hingga akhirnya saya memutuskan untuk memilih profesi sebagai dosen.

Secara tulus, saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Drs.Mudji Rahardjo, SU atas dukungan, dorongan dan kesempatan belajar banyak hal yang beliau berikan sejak saya menjadi dosen baru hingga detik ini saya menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar. Kepada Bapak Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com Akt, saya sampaikan banyak terimakasih atas dukungan kepada saya dan juga kesempatan berdiskusi khususnya dalam mendorong minat saya untuk belajar filsafat. Kepada adik-adik saya Akhmad Syakir Kurnia, SE, M.Si., Firmasnyah, SE, M.Si., terimakasih kalian sudah sangat banyak membantu saya melalui diskusi-diskusi panjang sehingga melalui forum-forum seperti itu saya terus bisa bertahan dalam proses pembelajaran diri.

Kepada Jaka Aminata, SE, MA., Faisal, SE, M.Si saya sangat berterimakasih, kalian telah banyak membantu dan bekerjasama dengan saya selama ini. Untuk Shanty Oktavilia, SE, M.Si dan Alfa Farah, SE., asisten-asisten saya di Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi, saya sangat berterimakasih kepada kalian yang telah banyak membantu saya baik dalam tugas-tugas akademik maupun dalam menyiapkan pidato ini mulai dari menyiapkan data, menelusuri jurnal dan mengedit naskah pidato ini. Kepada Erman Denny Arfinto, SE, MM. dan Drs. Fuad Mas'ud MIR, saya senang dan berterimakasih dengan masukannya atas naskah pidato saya ini.

Terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc dan Bapak Drs. Bagio Mudakir, MT juga teman-teman administrasi Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan; Mbak Tanti, Indri, Ingga dan Mas Muji, atas pengertian dan kerjasama yang telah kita bangun selama ini dalam mengelola Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Ibu Dra. Herniwati Retno Handayani, MS, terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Kepada adik-adik saya Drs. Maruto Umar Basuki, M.Si, dan Johanna Maria Kodoatie, SE, M.Ec, saya sangat berterimakasih atas kerjasama selama ini dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Terimakasih saya sampaikan kepada semua kolega saya di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, semua karyawan dan secara khusus kepada Mas Bihandono yang sangat berperan dalam persiapan pengajuan Guru Besar saya.

Dukungan yang sangat berarti dari teman-teman wartawan dan media, sangat saya rasakan sejak saya menjadi

dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Media masa seolah telah menjadi “universitas kedua” saya dimana saya bisa menyampaikan kuliah secara langsung kepada publik. Atas kebaikan tersebut saya sampaikan terimakasih tidak terhingga. Kepada Pemimpin Bank Indonesia Semarang dan semua pihak dimana saya mendapatkan pengalaman empiris sesuai dengan bidang keahlian saya, saya sampaikan banyak terimakasih.

Kepada orang yang paling dekat dalam hidup saya dan sekaligus yang paling banyak memberikan yang terbaik untuk saya; A. Karlina Eni isteri saya, anak-anak saya Ima dan Ivan, saya tahu, bagi kalian perhatian jauh lebih tinggi nilainya dari seribu ucapan terimakasih. Cinta dan doa saya untuk kalian dan semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita. Kepada orang tua saya Bapak/ Ibu Atmodinomo, syukur kepada Tuhan, pagi ini bisa hadir di sini, hormat dan terimakasih sangat tidak terhingga, karena atas kerja keras, doa dan restumu, hari ini Bapak/ Ibu telah menyaksikan sendiri saya dikukuhkan sebagai Guru Besar, yang insya Allah sesuai dengan harapan Bapak/Ibu. Kepada Bapak/ Ibu Jayeng Winoto (alm), saya dan keluarga menghaturkan terimakasih atas dukungan kepada kami sekeluarga dan senantiasa memohonkan doa untuk kebahagiaanmu. Kepada saudara kandung saya keluarga Mas Muharis, keluarga Mas Sanet Diasmojo dan keluarga Mas Suwandi terimakasih atas dukungan dan doanya. Kepada kakak saya Agustinus Sudi (alm), saya yakin engkau senang melihat yang terjadi hari ini dan doaku selalu menyertaimu di tempatmu yang abadi saat ini. Untuk Mbak Hartini, kiranya hanya terimakasih yang bisa saya

sampaikan atas dukungan dan bantuan kepada saya dan keluarga.

Akhirnya, kepada semua anggota panitia pelaksanaan upacara pengukuhan ini, baik panitia di Universitas, maupun panitia di Fakultas Ekonomi, saya dan keluarga menyampaikan banyak terimakasih. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pagi ini, saya mengucapkan banyak terimakasih. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, perkenalkan saya secara tulus mengucapkan banyak terimakasih kepada para sahabat saya yang telah bersedia hadir dalam acara pengukuhan saya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato ini ada kata-kata, ucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan.

Terimakasih, semoga rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita.

REFERENSI

- Adiwarman Karim, 2002, **Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro**, III T Indonesia, Jakarta
- Alesina, Alberto, 1997, "The Political Economy of High and Low Growth", **Annual World Bank Conference on Development, World Bank**
- Al-Ghazali, Imam, 2005, **Ihya' 'Ulumiddin**, Jilid 4 Cetakan I (Penerjemah: Ahmat Rofi' Usmani), Penerbit Pustaka, Bandung
- A.M. Syaefuddin, 2000, "Kebijakan Islam Mengatasi Harga Melambung", **Buletin DAKWAH** No. 50 Thn XXVII, 15 Desember, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Ari Kuncoro, 2004, "Bribery in Indonesia: Some Evidence from Micro-Level Data", **Bulletin of Indonesia Economic Studies**, Vol. 40 no 3, December, ANU
- Bantens, K, 2005, **Etika, Seri Filsafat Atma Jaya: 15**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barro, J Robert, 1996, "Determinant of Economic Growth: A Cross Country Empirical Study", **NBER Working Paper 5698**, August
- Barro, J Robert and Rachel McCleary, 2002, "**Religion and Political Economy in International Panel**", May 2, Harvard University
- Boediono, 2007, "Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia", Universitas Gadjah Mada.

- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaja AR, 1980, **Teori Strategi Pembangunan Nasional**, Gunung Agung, Jakarta
- Buchanan, James M, 1983, "Fairness, Hope and Justice ", in Roger Skurski: **New Directions in Economic Justice**, University of Notre Dame Press, London
- Capra, Fritjof, 2000, **Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan**, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta
- Chapra, M. Umer, 2001, **Masa Depan Ilmu Ekonomi sebuah Tinjauan Islam**, Gema Insani, Jakarta
- Clark, Charles Mihael Andres, 1992, **Economic Theory and Natural Philoshopy**, Edward Elgar Publishing Co, USA
- Collander, David, 2001, **The Lost Art of Economics: Essay on Economics and The Economic Profession**, Edward Elgar Publishing Co.
- Cooter, Robert D, 1983, "Justice and Mathematics", in Roger Skurski: **New Directions in Economic Justice**, University of Notre Dame Press, London
- Dowling, Malcolm J. and Ma. Rebecca Valenzuela, 2004, **Economic Development in ASIA**, Thomson Learning, Singapore
- Down, Robert B, 2001, **Buku-buku Pengubah Sejarah**, Tarawang, Jogjakarta

- F. Budi Hardiman, 2004, **Filsafat Modern**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- FX. Sugiyanto, 2004, "Dari Socrates, Copernicus, Newton, Adam Smith hingga Sterilisasi Ilmu Ekonomi", Makalah pada Kuliah Umum Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 3 September
- _____, 2005, "Metode Berpikir Ekonomi Newtonian dalam Ilmu Ekonomi", **Media Ekonomi dan Bisnis**, Vol XVI no 1, FE Undip Semarang
- Galbraith, John K, 1985, **The Industrial State**, 4th ed, Houghton Mifflin Company, Boston
- _____, 1978, "Power and Useful Economist", in **Reading in Political Economy**, edited by Wheelwright and Stilwell, Australia and New Zeland Book Company.
- Ghazanfar, S.M, 2000, "The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some Comperative Paralles and Links", **History of Political Economy** 32:4, Duke University Press.
- Ghazanfar, S.M and A. Azim Islahi, 1992, "Exploration in medieval Arab-Islamic Economic Thought: Some Aspects of Ibn Taimiyah's Economics" in S Todd Lowry: **Perspectives on The History of Economic Thought**, Vol 7, Edward Elgar Publishing Limited, England.
- Gintis, Herbert 1983, "Social Contradiction and the Liberty Theory ", in Roger Skurski: **New Directions in Economic Justice**, University of Notre Dame Press, London.

- Horgan, John, 2005, **The End of Science** (Senjakala Ilmu Pengetahuan), PT. Mizan Publika, Bandung
- Keraf, A. Sony, 1996, **Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah, Seri Filsafat Atma Jaya: 17**, Kanisius, Yogyakarta
- Kane, Tim., Kim R.Holmes, Mary A. O'Grady, 2007, "**The 2007 Index of Economic Freedom**", The Heritage Fondation and Dow Jones & Co, <http://www.heritage.org/>
- KWI, 1983., Konstitusi Pastoral "Gaudium Et Spes" Tentang Gereja Dalam Dunia Modern, **Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja**, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, OBOR Jakarta
- Landreth, Harry and David C. Collander, 1994, **History of Economic Thought, 3rd Ed**, Houghton Mifflin Company, Boston
- Meier, Gerald M., 2001., "The Old Genaration of Development Economist and The New", dalam Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz, 2001, **Frotier of Development Economics, The Future ini Perspective**, The World Bank, Washington DC
- Mubyarto, 1979, **Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-Tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan**, BPFE UGM, Yogyakarta
- _____, 1981, **Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan**, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika

- Myrdal, Gunnar, 1988, **Obyektivitas Penelitian Sosial**, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Nasr, Seyyed Hossein dan Oliver Leaman, 2003, **Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam**, Mizan, Bandung
- North, Douglass C, 2006, **Institutions, Institutional Change and Economic Performance**, Cambridge University Press
- Ormerod, Paul, 1997, **The Death of Economics**, John Wiley & Sons.Inc.605 Third Evenue, New York
- Ormerod, Paul, 1998, **Matinya Ilmu Ekonomi**, Buku 1 (Saduran Bahasa Indonesia oleh Parakriti T Simbolon), Gramedia, Jakarta
- Poramettee Vimolsiri, 1999, "Growth and Equity: Policy Lessons from The Experience of Thailand", **Regional Seminar on Growth with Equity**, Seoul, 15-17 June.
- Rao, P.K, 2003, **The Economics of Transaction Cost; Theory, Methods and Applications**, Palgrave Macmillan, New York
- Rawl, John. 1971, **A Theory of Justice**, The Belknap Press of Harvard University Press, Ch. IV a Summary., gadfly.igc.org/Rawls/4-RDP.PDF
- _____, 2006, **Teori Keadilan**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Reynold, Larry L, 1998, **A History of Economic Thought**, PDF Format: www.biosestate.edu/econ/lreynol/web/PDF_HET/

- Rivera-Batiz, Fransisco L, 1999, **Democracy, Governance and Economic Growth: Theory and Evidence**, Colombia University New York
- Roekmono Markam, 1980, "Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robins", **Prisma**, Januari Th. IX No 1, LP3ES Jakarta
- Solo, Robert A, 1991, **The Philosohopy of Science and Economics**, Macmillan Academic and Professional, LTD, London
- Smith, Adam 1976, **An Iquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations**, Clarendon Press, London
- Smith, Adam, 1997, **The Theory of Moral Sentiments**, Regnery Publishing Inc, Washington
- Stiglitz, Joseph E, 2002, **Globalization and Its Discontents**, WW. Norton Company
- Strathern, Paul, 1997, **90 Menit Bersama Socrates**, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Stone, IF, 1991, **Peradilan Socrates: Skandal Terbesar dalam Demokrasi Athena**, Grafiti, Jakarta
- Stuart Mill, John, 1996, **On Liberty**, Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Walter, W.J and E.L. Wheelwright, 1976., "University Economic: A Radical Critique" in **Reading in Political Economy**, Edited by Wheelwright and Stilwell, Australia and New Zeland Book Company

- Weber, Max, 2006, **Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme** (edisi terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wei, S.J, 1999, "Corruption in Economic Development, Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle?", **Policy reseach Working Paper 2048** (February) Washington D.C: World Bank
- Worland, Stephen T, 1983, "Adam Smith: Economic Justice and the Founding Father", in Roger Skurski: **New Directions in Economic Justice**, Uiversity of Notre Dame Press, London
- World Bank, 2005, "Indonesia Expanding Horizons", **www.siteresources.worldbank.org**
- Yassine Essid, 1992, "Greek Economic Thought in the Islamic miliue: Bryson and Dimashqi" in S Todd Lowry: **Perspectives on The History of Economic Thought**, Vol. 7, Edward Elgar Publishing Limited, Englanad
- Younkins, Edward W, 2006, "Thomas Aquinas' Chistian Aristotelianism", **Capitalism & Commerce**, www.quebecoislibre.org/060122-5.htm
- Zen, Amartya, 2001, **Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?** Mizan, Bandung

SUMBER DATA

United Nation Organization, [http://
milleniumindicators.un.org/unsd/snaama/
dnllist.asp](http://milleniumindicators.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp)

Asian Development Bank – Key Indicators: [http: //
www.adb.org/statistics/](http://www.adb.org/statistics/)

Badan Pusat Statistik (BPS): *Berita Resmi Statistik* (berbagai edisi)

Bank Indonesia: *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia* (Berbagai edisi)

Asian Development Bank (ADB) - Key Indicators 2005
(www.adb.org/statistics)